

Judul : Mahfud MD: Kartu Nikah Pemborosan
Tanggal : Rabu, 14 November 2018
Surat Kabar : Republika
Halaman : 8

Mahfud MD: Kartu Nikah Pemborosan

● NENI RIDARINENI

Komisi VIII menyatakan dana kartu nikah tahun ini disubsidi APBN.

YOGYAKARTA — Mantan ketua Mahkamah Konstitusi Mohammad Mahfud MD mengatakan, secara teknis administrasi penerbitan kartu nikah sedianya tidak bermasalah. Kendati demikian, ia meminta Kementerian Agama (Kemenag) menimbang urgensi pengadaan yang berpotensi mengarah pada pemborosan anggaran negara tersebut.

"Tidak jelek dan tidak baik, melainkan biasa-biasa saja. Itu bukan sebuah kreativitas yang luar biasa, tetapi kalau kartu nikah dalam bentuk kartu seperti ATM berisiko, lebih mudah hilang," kata Mahfud MD kepada wartawan di Kepatihan Yogyakarta, Selasa (13/11). Ia menambahkan, semisal kartu nikah hanya berupa tambahan dan tak menggantikan buku nikah maka itu pemborosan.

"Untuk apa sih sebenarnya. Un-

tuk menyesuaikan dengan teknologi biar terlihat maju? Tetapi tidak ada gunanya. Meskipun demikian, silakan saja mungkin Kementerian Agama punya uang tidak dipakai," kata guru besar Universitas Islam Indonesia ini. "Mungkin karena akhir tahun, ya? Untuk menghabiskan anggaran," tuturnya sambil tersenyum.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Sodik Mudjahid memastikan anggaran awal pengadaan kartu nikah berasal dari subsidi APBN. "Dalam masa transisi ini disubsidi oleh APBN," kata dia, Selasa (13/11).

Politikus Partai Gerindra itu mengatakan, keputusan itu sudah disetujui semua fraksi di Komisi VIII DPR RI saat membahas APBN. Alasannya, sebagai bentuk tambahan pelayanan kepada masyarakat.

Namun, dia mengatakan, Komisi VIII DPR RI belum bisa memastikan apakah pembiayaan pengadaan kartu nikah selalu dianggarkan dalam APBN setiap tahun. Dia berharap Kemenag bekerja lebih efisien agar dengan harga sama bisa mendapat buku dan kartu nikah sekaligus.

Sodik enggan menjabarkan jumlah anggaran APBN yang digunakan

untuk kartu nikah. Dia mengatakan, berdasarkan pandangan semua fraksi, jumlah anggaran itu tidak terlalu membebani pemerintah. Namun, subsidi itu hanya disepakati tahun ini saja sebagai tahun transisi. "Tahun depan, sekali lagi diserahkan kepada calon menikah dengan biaya yang relatif sama, harga sama, tapi dapat buku dan dapat kartu," ujarnya.

Sebelumnya, Direktur KUA dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag, Mohsen mengatakan bahwa Kemenag menganggarkan dana sebesar Rp 680 juta untuk menerbitkan 1 juta kartu nikah tahun ini. "Sebenarnya hitungannya itu, setiap satu buah kartu nikah itu Rp 680 per kartu. Jadi, kali saja dengan seberapa besar yang akan kita cetak, kalau misalnya 1 juta ya kali itu aja anggarannya," ujar Mohsen kepada *Republika*, Senin (12/11).

Menurut dia, anggaran Rp 680 juta tersebut hanya untuk kartu nikah, sedangkan segala sarana dan perangkat percetakannya itu dianggarkan sendiri, termasuk soal tintanya. "Tidak itu beda lagi (tidak termasuk perangkatnya), kalau alat cetaknya itu dia dianggarkan sendiri. Itu (Rp 680 juta) untuk kartu

aja. Sarana dan cetakan itu dianggarkan berbeda," ucap Mohsen.

Dia menjelaskan, anggaran Rp 680 juta tersebut akan diambil dari APBN dan telah disetujui oleh DPR. "Dana kartu nikah itu disiapkan dari APBN pusat. Jadi, kalau sudah masuk pagu kita berarti itu semua sudah melalui persetujuan DPR," kata Mohsen.

Sementara itu, kata dia, untuk biaya pembuatan buku nikah yang selama ini diberikan kepada masyarakat jauh lebih mahal. Sebab, kata dia, untuk satu buku nikah, pemerintah menganggarkan Rp 1.089, diambil dari APBN.

Mohsen memastikan bahwa penambahan kartu nikah tidak akan dikenai biaya tambahan. Pada 2018, menurut dia, Kemenag berencana menerbitkan 1 juta kartu nikah untuk dibagikan kepada pengantin baru.

"Kita prioritaskan 2018 dulu untuk 1 juta kartu nikah. Itu untuk yang baru nikah di 2018. Kita kan punya calon pengantin 2 juta setiap tahun," kata Mohsen. Kemenag merencanakan pengadaan kartu nikah bisa dilakukan di seluruh Kantor Urusan Agama se-Indonesia.

■ muhyiddin ed: fitriyan zamzami